

PENGARUH TATA KELOLA PEMBAYARAN PAJAK ONLINE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA BOGOR

THE INFLUENCE OF ONLINE TAX PAYMENT GOVERNANCE ON TAXPAYER COMPLIANCE AND THE ACHIEVEMENT OF HOTEL TAX REVENUE TARGETS IN THE CITY OF BOGOR

Topan Zenal Abidin¹, Abubakar Iskandar², Agus Suarman Sudarsa³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda,

*Korespondensi: Abubakar Iskandar, Email: abubakar.iskandar@unida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research to explain the governance of online tax payments at the Bogor City Regional Revenue Agency and determine whether there is an influence of online tax payment governance on hotel taxpayer compliance and the achievement of hotel tax revenue targets at the Bogor City Regional Revenue Agency. This research is an ex-post facto research using quantitative approach and functional correlation method. The data collection techniques used are questionnaires, and documentation studies. The data analysis technique uses descriptive analysis and simple linear regression. Based on the results of the analysis, it shows that: 1) the governance of hotel online tax payments carried out by BAPENDA of Bogor City is included in the good category with an average value of 4.14; 2) the governance of online tax payments that has been implemented by BAPENDA of Bogor City has a positive influence on the compliance of hotel taxpayers in Bogor City; 3) the governance of online tax payments that has been implemented by BAPENDA of Bogor City has a positive influence on the hotel tax revenue target in Bogor City.

Key words: Online tax payment governance, Hotel taxpayer compliance, Hotel tax revenue targets, Quantitative approach, Governance assessment.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tata kelola pembayaran pajak online di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan mengetahui apakah terdapat pengaruh tata kelola pembayaran pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan pencapaian target penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Penelitian ini berjenis penelitian ex post facto dengan pendekatan kuantitatif dan metode korelasi fungsional. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) tata kelola pembayaran pajak online hotel yang dilakukan BAPENDA Kota Bogor termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 4,14; 2) tata kelola pembayaran pajak online yang telah diterapkan BAPENDA Kota Bogor memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel yang ada di Kota Bogor; 3) tata kelola pembayaran pajak online yang telah diterapkan oleh BAPENDA Kota Bogor memberikan pengaruh positif terhadap target penerimaan pajak hotel di Kota Bogor.

Kata kunci: Tata Kelola Pembayaran Pajak Online, Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Target Penerimaan Pajak Hotel, Pendekatan Kuantitatif, Penilaian Tata Kelola.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak berperan penting dalam meningkatkan aset pemerintah, sehingga Dirjen Pajak meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan (Pratami, Sulindawati, & Wahyuni, 2017). Secara umum pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara (UU No. 28 Th 2007). Pajak merupakan pendapatan negara yang paling penting untuk membiayai segala macam kebutuhan, berperan dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan perekonomian negara (Tallaha, 2014).

Indonesia menerapkan sistem perpajakan self-assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, serta mengharuskan masyarakat berperan aktif secara langsung memenuhi kewajibannya untuk mendukung operasional pemerintah. Menurut Fitria (2010), ketidaktahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor lemahnya sistem self-assessment, yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak menjadi hal yang sangat penting bagi penerimaan pajak. Sayangnya, seringkali wajib pajak kurang memperhatikan kesulitan yang terjadi baik dalam proses pelaporan maupun pembayaran.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan karena menjamin keadilan dan keberlanjutan penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai anggaran publik.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, melihat pelaku usaha Indonesia yaitu 3,10% dari 261,1 juta masyarakat Indonesia. Total ada 8.000 pengusaha di Indonesia yang seharusnya bisa memaksimalkan penerimaan pajak Indonesia. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Ditjen Pajak (2016) yang menyebutkan bahwa tadinya pemerintah menetapkan target wajib pajak sebesar 72,50%, namun pelaksanaan tahun 2016 meleset dari target dan hanya mencapai 63,15 persen. Kenyataannya, kebanyakan wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami cara melaporkan SPT secara elektronik. Kemudahan pelaksanaan perpajakan ditentukan Berdasarkan pemahaman hukum perpajakan yang didukung oleh pendidikan atau pengetahuan dan kemudahan pemahaman hukum perpajakan (Nurmantu, 2005). Kepatuhan wajib pajak memerlukan perhatian karena dapat merugikan pemerintah akibat penggelapan pajak (Fidel, 2010). Pengurangan kewajiban pajak dapat membahayakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Chau, 2009). Kepatuhan wajib pajak terus menurun selama pandemi COVID-19. Hal itu berdasarkan pernyataan pemerintah yang dirilis melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa penerimaan pajak hingga akhir November 2020 sebesar Rp 925,3 triliun. Angka ini turun 18,5 persen dari tahun 2019 sebesar Rp 1.136,13 triliun karena terbatasnya kegiatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 (<https://www.pajakonline.com/dampak-pandemi-penerimaan-pajak-turun-185persen/> dicari 10.12.2021).

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengarahkan manusia menuju masyarakat di mana segala pengetahuan dan kehidupan bergantung pada teknologi dan informasi, yang mempermudah komunikasi antar manusia. "Dampak Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan

komunikasi juga merambah ke sisi negara, termasuk aspek perpajakan. Berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan wajib pajaki oleh wajib pajak dan peningkatan pelayanan perpajakan, diharapkan akan tercapai kepatuhan pajak, khususnya untuk pajak daerah. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kemudahan pelayanan, terutama dari segi administrasi.

Selama 40 tahun terakhir, perkembangan teknologi yang pesat telah memiliki dampak signifikan pada administrasi publik dan administrasi perusahaan. Hal ini juga berlaku dalam konteks perpajakan di Indonesia, di mana sistem informasi dan teknologi informasi telah menjadi perhatian dalam penyelenggaraan KPP (Kantor Pelayanan Pajak), baik untuk kebutuhan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun kebutuhan masyarakat secara umum. Pada masa lampau, administrasi perpajakan dilakukan secara manual yang memakan waktu dan melibatkan penggunaan kertas dalam jumlah besar. Namun, seiring dengan adopsi sistem dan teknologi informasi, banyak pekerjaan dapat dikurangi dan waktu pemrosesan dokumen dapat lebih efisien (Pandiangan, 2014).

Hal yang sama juga terjadi di Kota Bogor, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor sejak tahun 2016 sudah meluncurkan pembayaran dan pelaporan pajak secara online, (Admin, 2016). Bahkan pada tahun 2019, Bapenda Kota Bogor telah menerapkan layanan SPPT elektronik untuk membantu wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Pembangunan Tanah Daerah dan Perkotaan (PBB-P2), (Rahmawaty, 2019). Tujuan dilaksanakannya pembayaran pajak online ini adalah untuk mengurangi besarnya sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak sebagai optimalisasi penerimaan pajak, serta mengefektifkan penerimaan pajak dan mengurangi kebocoran yang terjadi sehingga

meningkatkan pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak. Ini tentang memfasilitasi dan mengurangi. Menimbulkan penyalahgunaan dalam penerapan pajak daerah melalui internet, karena wajib pajak menggunakan sistem online untuk langsung menghubungi pegawai yang menjalankan sistem administrasi Bapenda Kota Bogor. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Haryanto (2020) yang menunjukkan bahwa Ada implikasi antara sanksi perpajakan dan sistem pelayanan modern terhadap tuntutan wajib pajak orang pribadi di Kota Bogor.

Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) BAPENDA Kota Bogor Tahun 2018, secara umum Pajak Daerah yang mencakup sembilan jenis pajak yaitu: 1) pajak hotel, 2) i pajak restoran, 3) pajak hiburan, 4) i pajak reklame, 5) pajak penerangan jalan, i 6) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, 7) pajak perolehan hat atas tanah dan bangunani (BPHTB), 8) pajak parkir, dan 9) pajak air dan tanah terealisasi sebesar Rp.592.978.746.862,- (102,47%) dari target Pajak Daerah Kota Bogor tahun 2018 sebesar Rp.578.700.000.000,-.

Tahun 2018 realisasi pajak daerah melebihi target yang ditetapkan. Begitupun untuk jenis pajak Hotel, terealisasi 107,17% dari target. Akan tetapi harus menjadi catatan bahwa angka realisasi ditahun 2018 jauh menurun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017. Namun demikian, jika dilihat dari total perolehan penerimaan pajak di tahun 2015 hingga 2019, Kota Bogor selalu mencatatkan kinerja pajak yang baik dengan melampaui target yang ditetapkan.

Lebih khusus lagi, Pada tahun 2015, tercatat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 398,43 miliar, atau sebesar 101% dari target yang ditetapkan. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2016, terjadi peningkatan yang signifikan, dengan realisasi mencapai Rp 578,96 miliar atau

129% dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2017, terjadi sedikit penurunan dengan penerimaan sebesar Rp 555,47 miliar. Kemudian, pada tahun 2018, capaian penerimaan pajak meningkat kembali menjadi Rp 592,98 miliar, atau sebesar 106% dari target APBD yang ditetapkan. Di tahun 2019, realisasi penerimaan pajak mendapatkan 111% dari target yang ditetapkan, dengan nilai sebesar Rp 689,54 miliar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah selama periode tersebut adalah sebesar 112% dari target yang ditetapkan. (https://news.ddtc.co.id/begini-profil-pajak-kota-hujan-27193?page_y=2840, diakses pada tanggal 13.10.2021).

Berdasarkan pada data Kementerian Keuangan, realisasi atau perolehan penerimaan pajak daerah di Kota Bogor setiap tahunnya memperlihatkan capaian di atas 100%, salah satunya adalah penerimaan pajak hotel, yakni senilai Rp 87.882.978.001 melebihi dari target yaitu Rp 82.000.000.000 pada 2018. Hal ini tentunya menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi pemerintah Kota Bogor, karena telah mampu mengoptimalkan pendapatan atau penerimaan pajak daerahnya. Banyak faktor yang menjadikan kinerja pajak Kota Bogor baik, salah satunya adalah dengan merubah tata tata kelola pembayaran pajak, yang semula dilakukan dengan offline menjadi online.

Berdasarkan latar belakang masalah teori dan melihat kondisi di lapangan yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang baik dengan melihat pencapaian target pajak khususnya Pajak Hotel menunjukkan hasil yang maksimal dan sesuai target khususnya pada periode 2015-2019. Dalam hal ini penulis menduga kuat bahwa tata kelola pajak online telah dilakukan Bapenda Kota Bogor sejak 2016 dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pencapaian

target pajak Hotel. Oleh sebab itu, alasan mendasar bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian ini yang mencoba mengetahui dampak dari variabel tata kelola pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak dan pencapaian target pajak hotel di Kota Bogor.

Tujuan dari penelitian ini, antara lain: 1) menjelaskan tata kelola pembayaran pajak online di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2) mengetahui adanya pengaruh tata kelola pembayaran pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, dan 3) mengetahui adanya pengaruh tata kelola pembayaran pajak online terhadap pencapaian target penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan metode statistik. Tujuannya adalah untuk menyelidiki hubungan fungsional antara variabel bebas, yaitu tata kelola pajak online, dengan variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak dan target penerimaan pajak hotel. Desain penelitian yang digunakan adalah *ex post facto*, yang berarti penelitian dilakukan secara empiris dan peneliti tidak memiliki kendali langsung terhadap variabel bebas karena sulit untuk dimanipulasi secara fenomenal (Siregar, 2015).

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data secara rinci, teliti, dan sesuai dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan (Umar, 2013). Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang dilakukan pada populasi atau sampel tertentu

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Dalam konteks penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk menguji hubungan antara tata kelola pajak online dengan kepatuhan wajib pajak dan target penerimaan pajak hotel berdasarkan hipotesis yang diajukan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022 – November 2022, dimulai dari peneliti melakukan observasi untuk studi pendahuluan sampai penyusunan laporan. Penelitian ini dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang beralamatkan di Gedung BAPENDA, Jl. Pemuda No.31, Tanah Sareal, Kota Bogor.

Populasi pada penelitian ini berjumlah 210 orang dengan jumlah sampel sebanyak 68 orang. Pengambilan sampel tersebut, didasarkan pada perhitungan rumus Slovin dengan kelonggaran ketidakteelitian 5% dari jumlah populasi, (Umar, 2013). Angket dan dokumentasi adalah Peralatan yang digunakan sebagai alat pengumpulan data semua variabel baik tata Kelola pembayaran pajak online, kepatuhan wajib pajak maupun target penerimaan pajak hotel. Instrumen yang dibuat berdasarkan pada indikator variabel masing-masing menurut beberapa ahli yang telah ditentukan dan dikembangkan, (Kristanto, 2018).

Di dalam peneltian ini, peneliti menggunakan Teknik analisis deskriptif, yaitu sebuah teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan dampak pengelolaan pembayaran pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak dan target penerimaan pajak hotel di Kota Bogor dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Setiap jawaban dari angket tata Kelola pembayaran pajak online dan keaptuhan wajib pajak dilakukan dengan memberikan bobot atau skor yang disusun berlapis berdasarkan skala likert seperti tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 2 Skala Likert Pengukuran Variabel

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Dengan menggunakan skala pengukuran yang ditunjukkan pada tabel di atas, responden cukup mengisi (checklist) atau mencentang kotak untuk pernyataan yang paling mencerminkan pendapatnya. Skala ini merupakan perluasan dari skala semantik yang menghasilkan respons terhadap rangsangan yang disajikan dalam bentuk kategori semantik, dan dengan demikian mudah digunakan untuk studi yang berfokus pada responden dan objek yang menunjukkan tingkat kumpulan sifat tertentu untuk memungkinkan peneliti mempelajari bagaimana tanggapan berbeda dari satu responden ke responden lainnya, (Ferdinand, 2006).

Untuk mendapatkan analisis data dan menarik kesimpulan, sampel juga menggunakan perhitungan statistik sederhana, yaitu melakukan transformasi data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan menggunakan perhitungan WMS (Weight Means Score), dimana setiap pilihan jawaban diberi bobot. Untuk menginterpretasikan hasil respon kuesioner, dibuat tabel endpoint dari hasil kuesioner dengan skala interval sebagai berikut:

$$i = \frac{skt - skr}{v} = \frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

Pemberian skor seperti itu, akan mendapatkan rentang jawaban dari 1 hingga 5, jadi rentang antara 1 dan lainnya adalah 0,80. Kriteria interpretasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Kelas Interval i dan Kriteria Penelitian

Kelas Interval	Kriteria Penilaian
V 4,21 – 5,00	Sangat Efektif, Sangat Patuh,

Kelas Interval	Kriteria Penilaian
IV	3,41 – 4,20
III	2,61 – 3,40
II	1,81 - 2,60
I	1 – 1,80

Sangat Tinggi
Efektif, Patuh, dan Tinggi
Cukup Efektif, Cukup Patuh, dan Cukup Tinggi
Kurang Efektif, Kurang Patuh, dan Kurang Tinggi
Sangat Tidak Efektif, Sangat Tidak Patuh, dan Sangat Tidak Tinggi

Sumber:

Angka penafsiran kriteria penilaian didapatkan dengan menggunakan rumus *WMS* sebagai berikut:

$$\sum M = \frac{f(x)}{n}$$

Keterangan:

- M = Perolehan Angka Penafsiran
F = Pembobotan skala nilai
 \sum = Jumlah
n = Jumlah sampel penelitian.

Analisis selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dengan langkah-langkah berikut:

1. Uji Prasyarat Analisis

Sebelum melakukan analisis regresi sederhana, penting untuk melakukan uji prasyarat agar kesimpulan yang diperoleh dari analisis tidak menyimpang dari kebenaran, dapat diandalkan, dan dapat dipahami. Dalam penelitian ini, uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan uji linieritas, dengan tujuan untuk memverifikasi apakah data yang dikumpulkan memenuhi prasyarat analisis (Ali Muhson, 2015).

Untuk uji normalitas, peneliti menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka data dikatakan berdistribusi normal. Uji ini

membantu dalam mengevaluasi sejauh mana data mengikuti distribusi normal yang menjadi asumsi penting dalam beberapa analisis statistik.

Selanjutnya, uji linieritas dilakukan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai Sig. F adalah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel bersifat non-linier. Namun, jika nilai Sig. F adalah kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel bersifat linier.

Melalui uji prasyarat ini, diharapkan dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi sederhana memenuhi asumsi yang diperlukan, sehingga kesimpulan yang ditarik dapat lebih valid dan dapat dipercaya.

2. Uji Hipotesis

Analisis Korelasi Sederhana

Koefisien korelasi adalah angka yang menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel (x) dan variabel (y), dan koefisien korelasi dapat menentukan arah dan hubungan kedua variabel. Nilai korelasi (r) untuk kekuatan asosiasi berkisar antara -1 sampai 1, dengan arah dinyatakan dalam bentuk positif dan negatif (Siregar, 2015). Interpretasi koefisien korelasi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan tabel berikut:

Tabel 4 Interpretasi Tingkat Hubungan Variabel

Koefisien korelasi	Interpretasi
0,00 - 0,199	Sangat Lemah
0,20 - 0,399	Lemah
0,40 - 0,599	Cukup kuat
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat kuat

Sumber : (Sugiyono, 2016)

Penentuan Estimasi Persamaan Regresi

Regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependent. Jenis regresi linier yang dipakai adalah regresi linier sederhana, dimana regresi ini hanya dipakai untuk satu variabel bebas dan satu variabel terikat.

Pengujian Model Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Tujuannya adalah untuk menguji sebagian pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Menurut Ghozali (2005), Alasan keputusan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Membandingkan nilai t-number dengan t-tabel. Jika t tabel lebih besar dari t hitung, maka Ho diterima dan H1 ditolak. Apabila t tabel lebih kecil dari t hitung, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 2) Dengan angka probabilitas signifikansi. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan H1 ditolak. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Berikut adalah tabel analisis deskriptif terkait jawaban responden mengenai variabel tata Kelola pembayaran pajak online dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5 Hasil Analisis Deskriptif terkait Variabel Tata Kelola Pajak Online dan Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Nilai	Hasil Penafsiran
Tata Kelola Pajak Online	Kemudahan	4,25	Sangat Baik
	Kebermanfaatan	3,96	Baik
	Kepuasan pengguna	4,21	Sangat Baik
	Jumlah Rata-	4,14	Baik

	Rata		
Kepatuhan Wajib Pajak	Ketepatan Waktu	4,24	Sangat Patuh
	Tidak mempunyai tunggakan pajaki	4,26	Sangat Patuh
	Tidak pernah dijatuhi hukuman	4,16	Patuh
	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	4,29	Sangat Patuh
	Memenuhi kewajiban pajak	4,22	Sangat Patuh
	Kepatuhan dalam pelaporan	3,60	Patuh
Jumlah Rata-Rata		4,12	Patuh

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus *Weight Mean Score (WMS)* mengenai tiga indikator pada variabel tata kelola pembayaran pajak online hotel, jumlah rata-rata menunjukkan nilai 4,14. Hal tersebut memiliki arti bahwa tata kelola pembayaran pajak online hotel yang dilakukan oleh pemerintah kota Bogor termasuk dalam kategori baik. Begitupun mengenai enam indikator kepatuhan wajib pajak, menunjukkan nilai 4,12. Hal tersebut memiliki arti bahwa kepatuhan bagi wajib pajak yang menjalankan bisnis hotel di wilayah Kota Bogor tergolong atau termasuk dalam kategori patuh.

Analisis Korelasi Sederhana

Berdasarkan output analisis hubungan dengan memakai SPSS v22, diperoleh nilai R sebesar 0.957 untuk korelasi sederhana variabel tata kelola pajak online dan kepatuhan wajib pajak hotel, dan diperoleh nilai R sebesar 0,983 untuk korelasi sederhana variabel tata kelola pajak online dan target penerimaan pajak hotel. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi (Sugiyono, 2016) bahwa nilai interval korelasi 0.957 dan 0,983 termasuk dalam kategori sangat kuat. Artinya baik kepatuhan wajib pajak hotel dan target penerimaan pajak

hotel memiliki hubungan sangat kuat dengan tata kelola pajak online.

Estimasi Persamaan Regresi

Berdasarkan pengolahan data, hasil yang didapat dengan memakai SPSS V22 bahwa model persamaan regresi linear sederhana untuk memperkirakan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh tata Kelola pembayaran pajak online adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = 1.520 + 0,436X$$

$$Y_2 = 1.740 + 0,517X$$

Y_1 adalah variabel kepatuhan wajib pajak, dan X adalah tata Kelola pembayaran pajak online, yang dapat dianalisis bahwa koefisien regresi tata kelola pajak online (X) = 0,436, artinya setiap terjadi kenaikan pada variabel tata kelola pajak online hal ini diikuti dengan peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak (Y_1) dengan asumsi variabel lain tetap. Y_2 adalah variabel target penerimaan pajak, dan X adalah tata kelola pajak online, yang dapat dianalisis bahwa koefisien regresi tata kelola pajak online (X) = 0,517, artinya setiap terjadi kenaikan pada variabel tata kelola pajak online maka akan diikuti dengan kenaikan pada variabel target penerimaan pajak hotel (Y_1) dengan asumsi variabel lain tetap.

Pengujian Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi menunjukkan seberapa tinggi persentase kontribusi variabel tata kelola pajak online (X), terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu kepatuhan wajib pajak dan target penerimaan pajak hotel di Kota Bogor. Besar kecilnya kontribusi variabel bebas yang mempengaruhi variabel bebas ditunjukkan pada nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi atau R^2 dapat dilihat dengan menggunakan hasil pengolahan data SPSSV22 pada tabel *Model Summary* kolom *R Square*. Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai R^2

Pengaruh Tata Kelola Pembayaran Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bogor

sebesar 0,917 atau 91,7%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa sumbangan tata kelola pajak online terhadap naik atau turunnya kepatuhan wajib pajak adalah 91,7%, sisanya 8,3% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model yang diajukan dalam penelitian ini. Kemudian, berdasarkan Tabel berikutnya bahwa R^2 sebesar 0,943 atau 94,3%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa sumbangan tata kelola pajak online terhadap naik atau turunnya target penerimaan pajak adalah 94,3%, sisanya 5,7% merupakan sumbangan dari variabel yang lain dan tidak termasuk pada penelitian ini.

Pengujian Model Regresi Secara Parsial (Uji t)

Perhitungan tersebut menghasilkan hasil pengujian untuk pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas yaitu tata kelola pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak dan target penerimaan pajak di BAPENDA Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Tata Kelola Pajak Online (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_1)

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang diberikan Tata Kelola Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, secara statistik dapat terlihat di tabel di bawah ini:

Tabel 10 Koefisien Regresi Variabel X terhadap Y1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.520	1.277		1.190	.238
Tata Kelola Pajak Online	.436	.016	.957	26.958	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS V22, 2022

Berdasarkan analisis statistik uji t yang dilakukan dalam penelitian ini,

ditemukan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($26.958 > 1.668$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima, sementara hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pajak online yang telah diterapkan oleh BAPENDA Kota Bogor memberikan dampak pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel yang ada di Kota Bogor. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa penerapan e-registration, e-invoicing, dan e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur (Merkusiwati, Gusti Ayu Raisa Ersania, dan Ni Ketut Lely Aryani, 2018).

Pada dasarnya penerapan sistem online dalam dunia perpajakan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau wajib pajak. Sama halnya dengan sistem aplikasi pembayaran pajak online dengan menggunakan layanan SPTPD online bermanfaat bagi wajib pajak yaitu mereka membuat pengajuan dan pembayaran pajak lebih mudah, menyederhanakan proses dan mengurangi waktu. Selain itu, pembayaran pajak online membantu meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya sistem online ini pada saat membayar pajak daerah, memudahkan wajib pajak dan mengefisienkan proses administrasi perpajakan, sehingga keterlambatan pembayaran pajak dapat dikurangi (Leliya dan Fifi Afyah, 2015).

Suhendra (2010) melakukan penelitian mengenai dampak tingkat kewajiban pajak penghasilan badan terhadap pertumbuhan pemungutan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu, kepatuhan wajib pajak penghasilan badan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan badan dalam melaporkan dan membayar

kewajiban perpajakan mereka, maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat.

Kemudian penelitian Agustin dan Herawaty (2009) menemukan adanya pengaruh positif antara kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Grogol Petambura, Jakarta. Semakin banyak wajib pajak yang mematuhi dalam melaporkan dan membayar pajak, semakin tinggi penerimaan pajak KPP. Hasil penelitian Senda Agustin dan Herawaty Fahzurahman (2016) tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Menurut dia, pemenuhan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan riil, sehingga pemenuhan tersebut diperlukan dalam sistem self assessment, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang optimal di KPP Bandung Karee. Oleh karena itu, ketika penerimaan pajak meningkat, wajib pajak akan membutuhkan tingkat kepatuhan yang jauh lebih tinggi untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya. bahwa mereka memiliki salah satu faktor pendukung penerimaan pajak. berpartisipasi dalam pembangunan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh tata kelola pajak online (X) terhadap target penerimaan pajak hotel (Y2)

Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh yang diberikan tata kelola pajak online terhadap target penerimaan pajak hotel di Kota Bogor dapat terlihat pada tabel berikut: secara statistik akan diuji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 11 Koefisien Regresi Variabel X terhadap Y2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.740	1.497		1.187	.156

Tata Kelola Pajak Hotel Online	.517	.018	.963	28.148	.000
--------------------------------	------	------	------	--------	------

a. Dependent Variable: Target Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan uji koefisien regresi parsial, hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai t -hitung $>$ t -tabel ($28.148 > 1,668$). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola pajak online yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Bogor memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap target penerimaan pajak hotel di Kota Bogor.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan sistem perpajakan online oleh KPP Pratama Singaraja juga memiliki pengaruh terhadap optimisasi penerimaan pajak, meskipun tidak begitu signifikan (Diatmika, 2017). Temuan ini juga mendukung penelitian Tikupadang dan Palalangan (2020), yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak, kesadaran tentang pengarsipan elektronik, pemeriksaan pajak, dan penghindaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian lain juga mendukung hasil ini, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh penggunaan electronic filing yang merupakan bagian dari administrasi perpajakan online. Hal ini menunjukkan bahwa electronic filing dapat membantu dan mempengaruhi penerimaan pajak, karena jika wajib pajak menggunakan electronic filing dengan patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Penggunaan sistem pengisian elektronik juga memungkinkan pengiriman SPT secara online dan fleksibel. Oleh karena itu, pelayanan sistem kearsipan elektronik harus ditingkatkan agar mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT dan

meningkatkan penerimaan pajak (Astuti, 2015)

KESIMPULAN

Setelah melalui semua tahapan penelitian, mulai dari membuat proposal penelitian, menggali teori, Menyusun instrumen penelitian, hingga pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Akhirnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

Pertama, berdasarkan perhitungan rata-rata menggunakan rumus Weight Mean Score (WMS), ditemukan bahwa nilai rata-rata untuk tiga indikator dalam variabel tata kelola pembayaran pajak online hotel (kemudahan, kebermanfaatan, dan kepuasan pengguna) adalah 4,14. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pembayaran pajak online hotel yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Bogor masuk dalam kategori baik.

Kedua, melalui analisis regresi sederhana, dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($26.958 > 1.668$). Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pajak online oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Bogor.

Ketiga, dalam pengujian koefisien regresi sederhana secara parsial, ditemukan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($28.148 > 1.668$). Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi tata kelola pajak online oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencapaian target penerimaan pajak hotel di Kota Bogor.

SARAN

Berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini BAPENDA Kota Bogor agar terus mempertahankan bahkan melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dalam menerapkan sistem pembayaran pajak online agar memberikan kemudahan, kebermanfaatan dan kepuasan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini BAPENDA Kota Bogor harus senantiasa melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait penerapan sistem pembayaran secara online agar kepatuhan wajib pajak yang sudah terbangun baik tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2016, September 21). Kota Bogor Terapkan Bayar Pajak Sistem Online. Retrieved from <https://www.heibogor.com/>: https://www.heibogor.com/post/detail/10385/kota-bogor-terapkan-bayar-pajak-sistem-online/?_cf_chl_jschl_tk__=d49ce3828267a337a391dda3b93e859ab7c11ea9-1593032614-0-AXZmfGpGo_24v vx8ym7mUgz9bdytoTHXaGOjaszLtGCNHvLeVnC_RxYwGjHKDVwSL_itPTRJKAT0Ali tIQ1h6obXCJ
- Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama", Simposium Nasional Akuntansi 12, Palembang, 2009
- Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan E-filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.
- Damayanti, S. d. (2015). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Direktorat Jenderal Pajak . (2016). Laporan Kinerja. Jakarta: <http://www.pajak.go.id/>.
- DIRJENPA. (2020, Juni 23). Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak dalam. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/>: <http://www.pajak.go.id/>
- Diatmika, I. P. (2017). Fektivitas Penerapan Sistem Elektronik Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, Bali). Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 77-88.
- Fazhlurahman, F. (2016). Pengaruh Ekstensitasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Bandung Karess Tahun 2010-2015). Jurna Aset Vol.5, No.2.
- Ita, S. R. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung "X"). Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009, 119-138 .
- Leliya Dan Fifi Afiyah. (2015). Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon . Jurnal Al-Mustashfa Vol.4 No.2 , 158-177.
- Machfud Sidik, S. (1996). Keuangan Daerah . Jakarta: Universitas Terbuka .

- Merkusiwati, Gusti Ayu Raisa Ersania Dan Ni Ketut Lely Aryani. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.22.3., 1882-1908.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Palalangan, W. K. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem E-Filling, Tax Audit, Dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Makassar Utara). *Paulus Journal Of Accounting (Pja)* Vol 1 No 2 , 55-53.
- Pratami, Sulindawati, Dan Wahyuni (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja . *Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 7 (1).
- Rahmawaty, L. (2019, Januari 15). Bapenda Kota Bogor Terapkan Layanan Sppt Elektronik. Retrieved From [Megapolitan.AntaraneWS.Com: HttPS://Megapolitan.AntaraneWS.C om/Berita/47840/Bapenda-Kota-Bogor-Terapkan-Layanan-Sppt-Elektronik](https://Megapolitan.AntaraneWS.Com/Berita/47840/Bapenda-Kota-Bogor-Terapkan-Layanan-Sppt-Elektronik)
- Siregar, S. (2015). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi Spss Versi 17 . Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung : Alfabeta Cv.
- Suhendra, Euphrasia Susy. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1, Volume 15, April 2010.
- Trizalia Yunita, Rita Rahmawati, Rusliandy (2019). Pengaruh Reformasi Pelayanan Publik E-Government Terhadap Revitalisasi Penyelenggaraan Birokrasi Di Kantor Imigrasi Kota Bogor. *Jurnal Administrasi Publik*, ISSN: 2715-2499, Volume 1 Nomor 1
- Uu No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajaka
- Wendy Kala Tikupadang Dan Carolus Askikarno Palalangan. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem E-Filling, Tax Audit, Dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak" (Studi Kasus Pada Kpp Makassar Utara), *Paulus Journal Of Accounting (Pja)* Vol 1 No 2 Tahun 2020
- [HttPS://Www.Pajakonline.Com/Dampak-Pandemi-Penerimaan-Pajak-Turun-185 Persen/](https://Www.Pajakonline.Com/Dampak-Pandemi-Penerimaan-Pajak-Turun-185-Persen/) Dicari 10.12.2021
- [htttPS://news.ddtc.co.id/begini-profil-pajak-kota-hujan-27193](https://news.ddtc.co.id/begini-profil-pajak-kota-hujan-27193) dicari 13.10.2021.